

## PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA IKUT SERTA DALAM KICK OFF MEETING IPKD 2024



Sumber gambar: <https://www.lingkupmedia.id/pemerintah-kabupaten-bombana-ikut-serta-dalam-kick-off-meeting-ipkd-2024/>

### Isi Berita:

BOMBANA, LINGKUMEDIA.id – Pemerintah Kabupaten Bombana aktif berpartisipasi dalam acara Kick Off Meeting Penginputan dan Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun 2024. Acara ini diselenggarakan secara virtual melalui platform Zoom Meeting oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Kamis (15/7/2024).

Kick Off Meeting ini secara resmi dibuka oleh Plh. Kemendagri Dr. Sumule Tumbo, SE, MM, Direktur Fasilitasi Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah Kemendagri, dan dihadiri oleh berbagai stakeholder dari seluruh Indonesia. Kabupaten Bombana diwakili oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Sumarni, S.ST., M.Kes, beserta pemangku kepentingan lainnya.

Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk mengukur kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Selain itu, pertemuan ini bertujuan untuk memacu dan memotivasi Pemerintah Provinsi serta Kabupaten/Kota dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah, melakukan publikasi atas hasil pengukuran IPKD, serta memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang memiliki IPKD berpredikat terbaik secara nasional.

Pertemuan ini juga bertujuan untuk meningkatkan peran aparat pengawas internal pemerintah dan mewujudkan pengawasan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Kepala Badan Riset dan inovasi Daerah (BRIDA) Sumarni menyampaikan komitmen penuh Pemerintah Kabupaten Bombana untuk mendukung program nasional ini dengan melakukaninginputan data yang akurat dan tepat waktu. “Penginputan data yang

akurat merupakan kunci utama dalam mendapatkan informasi yang valid dan dapat diandalkan. Hal ini akan memungkinkan pemerintah daerah untuk mengambil keputusan yang lebih tepat sasaran dan efektif dalam mengelola berbagai program pembangunan. Oleh karena itu, seluruh jajaran terkait di Kabupaten Bombana diimbau untuk menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme”. Ujar Sumarni

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi dalam memastikan keberhasilan pengukuran IPKD yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kolaborasi yang baik antara instansi pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat, akan mempermudah pertukaran informasi dan data yang diperlukan.

Selain itu, kerjasama ini juga akan memperkuat sinergi dalam pelaksanaan program-program strategis yang dapat mendukung pencapaian target nasional. Dengan demikian, setiap instansi diharapkan dapat saling mendukung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, Sumarni juga mengajak seluruh pihak untuk terus berinovasi dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Inovasi dalam metode pengumpulan dan analisis data akan memberikan dampak positif bagi kualitas hasil yang dicapai.

Sementara itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan akan memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dengan komitmen yang kuat dan kerjasama yang solid, diharapkan Kabupaten Bombana dapat menjadi contoh sukses dalam mendukung program nasional dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Ungkapnya (ADV)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.lingkupmedia.id/pemerintah-kabupaten-bombana-ikut-serta-dalam-kick-off-meeting-ipkd-2024/>, “Pemerintah Kabupaten Bombana Ikut Serta dalam Kick Off Meeting IPKD 2024”, tanggal 15 Juli 2024.
2. <https://www.harapansultra.com/pemerintah-kabupaten-bombana-aktif-berpartisipasi-dalam-kick-off-meeting-ipkd-2024/>, “Pemerintah Kabupaten Bombana Aktif Berpartisipasi dalam Kick Off Meeting IPKD 2024”, tanggal 15 Juli 2024.

#### **Catatan:**

- Pengelolaan Keuangan Daerah yang benar akan menjamin kemajuan, peningkatan ekonomi daerah, serta kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.
- Terkait hal diatas diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:

1. Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan “Pengukuran IPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan data yang bersumber dari:
  - a. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri terkait dokumen RPJMD dan RKPD;
  - b. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri terkait dokumen KUA-PPAS dan APBD;
  - c. Pemerintah Daerah terkait dengan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan LKPD;
  - d. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  - e. Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran terkait dengan dokumen dan informasi penyerapan anggaran; dan
  - f. Badan Pemeriksa Keuangan terkait dokumen dan informasi opini atas LKPD.”
2. Pasal 6 yang menyatakan “IPKD diukur melalui 6 (enam) dimensi meliputi:
  - a. kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran;
  - b. pengalokasian anggaran belanja dalam APBD;
  - c. transparansi pengelolaan keuangan daerah;
  - d. penverapan anggaran;
  - e. kondisi keuangan daerah; dan
  - f. opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD.”